

# PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI SUMATERA UTARA

*KAJIAN TERHADAP PEMILU 2004 DAN 2009*

## KARYA ILMIAH



OLEH :

**ISMAIL FAHMI, S.Pd, SH, M.Si.**  
**DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2009**

36

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum.Wr.Wb.**

Puji dan syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan Judul. **“PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI SUMATERA UTARA”**.*(Kajian Terhadap Pemilu 2004 dan 2009)*

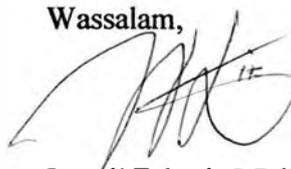
Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses pengusulan kepangkatan dosen akademik staf pengajar pada universitas Medan Area yang berada pada naungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Dalam penyusunan karya ilmiah yang cukup sederhana ini, saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang saya miliki. Walaupun demikian, saya berharap semoga dapat bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dan akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 15 Desember 2009

Wassalam,



Ismail Fahmi, S.Pd, SH, M.Si

Kata Pengantar

Daftar Isi

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat penulisan .....	7
D. Ruang Lingkup Penulisan .....	8
E. Metode Penulisan .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13

**BAB II : PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

A. Pada Masa Orde Baru .....	15
B. Sejarah Pemilu Indonesia .....	19
C. Pemilu di Provinsi Sumatera Utara .....	44

**BAB III : GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

A. Deskripsi Provinsi Sumatera Utara .....	46
B. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .....	47
C. Gambaran Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Utara .....	51

**BAB IV : PENDUDUK DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
SUMATERA UTARA**

A. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Utara Pada Pemilu..	52
B. Porelahan Kursi DPRD Sumatera Utara 2004-2009 .....	56
C. Porelahan Kursi DPRD Sumatera Utara 2009-2014 .....	61

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **GAMBARAN PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI SUMATERA UTARA**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi Politik adalah merupakan sebuah aspek penting di dalam sebuah Negara demokrasi, juga sebagai sebuah tolak ukur tingkat Demokratisasi di dalam sebuah Negara dan untuk memahami konsep partisipasi politik tersebut perlu dilihat definisi yang dikemukakan oleh Rahman(2002 : 128) berikut : partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Huntington dan Nelson (1990 : 6) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah sebagai suatu kegiatan warga Negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dengan melihat uraian diatas jelas bahwa partisipasi politik rakyat sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan suatu Negara karena akan menimbulkan keputusan-keputusan pemerintah dalam perjalanan pemerintahan dalam kurun waktu tertentu.

Politik berkaitan erat dengan penggunaan kekuasaan dalam kehidupan bersama. Kekuasaan itu digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dan biasanya

dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan, politik sering tak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Politik adalah salah satu bagian dari sistem kebudayaan, di samping ada yang disebut ekonomi, teknologi, seni dan agama. Ada negara yang memandang keikutsertaan setiap manusia dalam penggunaan kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama sebagai suatu hal yang baik, ada juga yang memandang itu justru sebaliknya. Negara yang memandangnya buruk lazim dikategorikan sebagai

negara oligarki, sebaliknya negara yang memandangnya baik dikategorikan sebagai negara demokrasi. Suatu negara pantas disebut negara demokrasi apabila ia mengundang partisipasi warganegara setiap kali hendak mengambil keputusan yang akan mempengaruhi jalannya kehidupan bersama. Ringkasnya demokrasi ada apabila ada partisipasi. Partisipasi ini berbentuk tuntutan dan dukungan, tapi bisa juga kontrol atau pengawasan ( Ibrahim, 1984 : 15 ).

Bagaimana cara individu mempengaruhi keputusan itu, sangat ditentukan oleh persepsinya dan cara ia mengkomunikasikannya. Dalam kehidupan bersama masa kini dibentuk berbagai lembaga sosial, misalnya saja, partai politik. Namun harus disadari partai politik ini hanyalah salah satu lembaga sosial dari sekian lembaga untuk menyalurkan pengaruh individu terhadap keputusan yang akan diambil. Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun kehidupannya sangat ditentukan oleh bangsa itu sendiri, demikian pula dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia seharusnya mampu memandang dan menyikapinya secara sungguh-sungguh segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Sejalan dengan tuntutan reformasi di Indonesia telah terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan

nasional. Banyak hal yang sebelumnya dianggap sebagai suatu hal yang biasa, harus mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan era reformasi. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia, bangsa Indonesia mulai mencoba membenahi segala sistem pemerintahannya, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya serta dalam sistem hukum dan demokrasi. Bangsa Indonesia dalam sistem demokrasi mulai melaksanakan amanat reformasi yakni melalui penyelenggaraan Pemilu. Momentum Pemilihan Umum dianggap sangat penting dan berharga, terutama dalam melakukan penilaian terhadap mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selama lima tahun terakhir, dan untuk mengatur langkah yang berarti dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Pemilihan Umum di Indonesia sejak orde reformasi telah berlangsung selama dua kali, yaitu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004. Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar menjamin derajat, kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat perwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Hasil pemilu tahun 1999 yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan terbebas dari keterpurukan tampaknya tidak berhasil. Masyarakat semakin reflektif dan kritis meski sering diikuti rasa pesimis dan putus asa terhadap masa depan bangsa ini. Masyarakat akhirnya berharap dengan pemilu yang menggunakan sistem pencantuman nama calon legislatif (caleg) sehingga sangat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui secara langsung figur wakilnya yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi rakyat serta

mampu membawa banyak perubahan melalui berbagai kebijakan serta pembangunan di segala bidang.

Pembangunan adalah semua aktivitas perubahan yang secara sadar diupayakan oleh manusia, kesadaran tersebut dinyatakan dalam suatu rencana serta diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum pembangunan dilaksanakan. Pencapaian tujuan itu berlangsung dalam jangka panjang yang terbagi dalam beberapa tahapan-tahapan kegiatan, atau disebut juga *progrees*. Terdapat beberapa tahapan untuk mencapai *progrees*. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam melaksanakan pembangunan dibantu oleh segenap masyarakat dan organisasi-organisasi masa. Pada masa Orde Baru pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai melaksanakan penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan politik, terutama dalam rangka mengikuti program nasional dalam bidang penyederhanaan kepartaian dan kekaryaan menjadi dua kelompok partai dan satu kelompok golongan karya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Orde Baru lahir dari kesadaran baru untuk mengadakan tatanan baru dalam segala segi kehidupan nasional kita, menggantikan tatanan lama yang telah mengandung benih-benih krisis dan kegoncangan, yang jelas kala itu pemerintahan Orde Baru diharapkan akan mengantarkan bangsa ini menuju kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Perkembangan politik di Indonesia pada masa Orde Baru banyak dipengaruhi oleh usulan-usulan Golkar dan ABRI. Golkar dan ABRI berhasil menguasai seluruh sendi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, hal itu membuat partai-partai lain tidak bisa berkuat. Setelah muncul gerakan reformasi yang dilakukan oleh intelektual kampus bersama

rakyat, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya mengalami keruntuhan. Paska pemerintahan Soeharto, kekuasaan berpindah pada BJ. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Pemerintahan BJ. Habibie yang dianggap transisi ini berhasil menyelenggarakan Pemilu yang demokratis pada tahun 1999.

Seiring dengan perkembangan politik bangsa Indonesia, era Orde Baru berganti dengan era reformasi. Pengaruh eforia reformasi di Provinsi Sumatera Utara relatif besar terutama bidang politik hal itu ditunjukkan dengan diberikannya kebebasan bagi partai-partai baru untuk muncul dan menjadi peserta pemilu bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan diantaranya telah diakui keberadaannya sesuai dengan UU. RI No. 31 Tahun 2002. Menurut Undang-undang tersebut partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun ke atas.

Sebelum Pemilu dilaksanakan, partai-partai politik telah mulai menarik perhatian massa melalui kegiatan kampanye. Di Indonesia pola dan strategi kampanye masih dilakukan secara masal. Kampanye dilakukan di lapangan terbuka dan diwarnai penyelenggaraan pawai di tempat-tempat tertentu dan dalam satu momen kampanye ditampilkan lebih dari satu juru kampanye (jurkam). Kampanye menjadi ajang persaingan program, dan biasanya program itu identik dengan program-program pembangunan. Namun, sebenarnya bisa dikatakan tidak mungkin membeberkan program di tengah-tengah masa kampanye yang emosional. Yang paling mudah dilakukan oleh juru kampanye dalam situasitersebut adalah

memabangkitkan emosi massa dengan slogan-slogan yang memojokkan atau menghancurkan lawan politiknya.

Hasil pemilu tetap merupakan indikator perubahan politik yang paling kongkret. Pemilu yang telah berjalan menggambarkan terjadinya perimbangan kekuatan antar Organisasi Peserta Pemilu yang bersaing. Namun partai apapun yang menang dalam Pemilu yang diperlukan oleh bangsa Indonesia adalah sosok pemimpin yang adil, jujur dan berwibawa serta bertanggung jawab membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terletak di pulau sumatera yang kaya akan sumber daya alam baik pertambangan perikanan dan pertanian dan terdiri dari berbagai etnik yang ada dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi yang menjadi sasaran kampanye politik peserta Pemilu, banyak janji-janji, slogan-slogan dan program kerja serta pembangunan di segala bidang yang ditawarkan oleh peserta Pemilu untuk menarik simpati para pemilih. Tujuan utamanya adalah untuk menarik masa sebanyak-banyaknya, namun, apakah janji-janji harapan serta program kerja itu berhasil dan terlaksana setelah diselenggarakannya Pemilu. Bertolak dari pemikiran tersebut di atas menyebabkan penulis tertarik menulis bagaimana **“PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI SUMATERA UTARA”**.*(Kajian Terhadap Pemilu 2004 dan 2009)*

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran secara jelas dan sistematis, sehingga akan mudah dipahami dengan jelas dari permasalahan yang sebenarnya. Adapun permasalahan yang ingin diketahui yaitu:

1. Bagaimana kondisi perkembangan Partai Politik di Provinsi Sumatera Utara setelah reformasi
2. Bagaimana kondisi Partai Politik di Provinsi Sumatera Utara setelah reformasi.
3. Bagaimana peran serta Partai Politik di Provinsi Sumatera Utara dalam hubungannya dengan partisipasi politik

## **C. Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penulisan**

Penulisan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kondisi kehidupan partai politik Provinsi Sumatera Utara setelah reformasi
2. Untuk mengetahui kondisi perkembangan partai politik di Provinsi Sumatera Utara setelah reformasi.
3. Untuk mengetahui peran serta Partai Politik di Provinsi Sumatera Utara dalam dalam hubungannya dengan partisipasi politik

Adapun manfaat yang bisa di ambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Memberi masukan kepada pemerintah. Khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang pentingnya peranan Partai Politik dalam Pembangunan
2. Bagi pembaca Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai peranan Partai Politik di Provinsi Sumatera Utara
3. Bagi Masyarakat Dapat menambah pengetahuan tentang perlunya Partai Politik dalam kehidupan berdemokrasi, yakni sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi rakyat agar pembangunan yang dilakukan oleh partai yang berkuasa sesuai dengan keinginan rakyat.

#### **D. Ruang Lingkup Penulisan**

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, demikian pula biaya dan tenaga, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial maupun ruang lingkup temporal. Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, bukan untuk mengurangi sifat ilmiah suatu pembahasan.

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Ruang Lingkup Wilayah / Spasial**

Ruang lingkup wilayah / spasial adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan suatu daerah atau kawasan tertentu tempat peristiwa itu terjadi. Dalam penelitian ini daerah yang diambil adalah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan

salah satu wilayah yang ada di pulau sumatera dan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Ruang Lingkup Waktu / Temporal

Ruang lingkup waktu / temporal adalah hal-hal yang berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa itu, penulisan ini di angkat dengan lingkup waktu antara waktu 2004 dan 2009 karena pada priode ini adalah periode setelah reformasi berjalan lima tahun

## E. Metode Penulisan

Penulisan ini adalah tentang gambaran Pemilu dan hubungannya dengan partisipasi politik rakyat di Provinsi Sumatera Utara suatu tinjauan sesudah reformasi 2004 dan 2009. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Dengan metode sejarah, penulis berusaha menguji dan menganalisis kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Oleh sebab itu, penulisan ini akan penulis tempuh dengan melakukan prosedur penelitian sejarah menurut Louist Gottschalk (1975: 32) yang terdiri dari empat langkah kegiatan yang saling berurutan, sehingga antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Keempat langkah tersebut adalah heuristik (pencarian atau penemuan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penyajian dalam bentuk cerita sejarah).

### 1. Heuristik (pencarian sumber)

Sebagai langkah pertama dalam penelitian sejarah ini adalah dengan cara heuristik. Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari atau menghimpun data dan sumber-

sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti: dokumen, arsip, naskah, surat kabar maupun buku-buku referensi lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Secara umum sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis :

- a. Sumber primer, yaitu kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca yang lain atau dengan alat mekanik seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan.
- b. Sumber sekunder, yakni kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (Gottschalk, 1975: 35).

Pada tahap heuristik ini penulis mencari literatur-literatur kepustakaan dan melakukan akses internet yang berhubungan dengan masalah yang ditulis. Sumber-sumber yang diperoleh dengan riset kepustakaan dan akses internet berbagai sebagai bahan pembanding, pelengkap dan penganalisa guna memperdalam permasalahan yang dibahas. Adapun beberapa buku yang dapat dijadikan referensi dalam karya ilmiah ini diantaranya: situs Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Partai Politik Peserta Pemilu 2004-2009 Perjalanan dan Profilnya; Perjalanan Partai Politik di Indonesia dan masih banyak sumber lain yang digunakan dalam karya ilmiah ini. Dalam mengumpulkan data yang berupa sumber-sumber sejarah, penulis menelaah dan mencari sumber-sumber sejarah yang tertulis berupa buku, majalah, internet dan referensi yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam karya ilmiah ini sumber sejarah yang penulis gunakan adalah buku-buku referensi yang membahas tentang kondisi kehidupan di Provinsi Sumatera Utara pada masa

orde baru hingga reformasi, perjalanan partai politik di Provinsi Sumatera Utara pada khususnya serta yang membahas tentang bagaimana peran partai politik dalam pembangunan dan hubungannya dengan partisipasi rakyat dalam Pemilu..

Dokumen ini terdapat dalam Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembinaan Organisasi kekuatan Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Penulis juga mengadakan penelitian pustaka langsung seperti :

- a. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara .
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
- c. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara melalui akses internet.

## **2. Kritik Sumber**

Kritik sumber adalah tahap penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang dikumpulkan, dilihat dari sudut pandang nilai kebenarannya. Kebenaran dari sumber-sumber sejarah itu dapat diteliti secara otentisitas maupun kredibilitasnya sehingga benar-benar dapat teruji keasliannya. Dalam kritik sumber ini peneliti melakukan dua cara, yaitu kritik sumber ekstern dan kritik sumber intern. Guna mendapatkan fakta-fakta sejarah dalam tahap kedua tersebut dibagi menjadi kritik ekstern dan kritik intern.

## **3. Interpretasi**

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan menetapkan artinya. Interpretasi yang peneliti lakukan tak lain merupakan usaha untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dalam melakukan interpretasi peneliti menggunakan cara dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat ditetapkan makna atau arti dari kejadian-kejadian sejarah. Dalam proses ini tidak semua fakta dapat dimasukkan tetapi harus dipilih fakta yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun. Dalam melakukan interpretasi ini langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menganalisis suatu data atau fakta yang telah didapat dan mempunyai hubungan dengan rangkaian fakta berikutnya. Adapun data yang didapat peneliti adalah hasil pelaksanaan Pemilu Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pelaksanaan Pemilu 2004 dan 2009, dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi pembangunan politik Provinsi Sumatera Utara sejak reformasi 1999 menunjukan keadaan yang sangat menggembirakan. Kondisi tersebut memang memungkinkan karena program pemerintah benar-benar terlaksana secara tepat. Program-program tersebut, misalnya pembinaan umum dan bidang pengamanan sehingga tercipta stabilitas yang dinamis.

#### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang peneliti lakukan. Tahap ini merupakan langkah penulisan sejarah yang disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah dimengerti yang

dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-bagian yang dapat membangun urutan kronologis dan tematis. Kemampuan peneliti untuk menjaga agar standar mutu cerita sejarah dapat dicapai yaitu dengan menyusun cerita menurut urutan peristiwa berdasarkan kronologi, tema-tema dan prinsip kebenaran dan kemampuan imaji agar dapat menghubungkan peristiwa yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian cerita yang masuk akal dan mendekati kebenaran.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka penulisan laporan penelitian ini, penulis perlu menjabarkan sistematika penulisan yang dituangkan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat penulisan

D. Ruang Lingkup Penulisan

E. Metode Penulisan

F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

A. Pada Masa Orde Baru

B. Sejarah Pemilu Indonesia

C. Pemilu di Provinsi Sumatera Utara

### BAB III : GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- A. Deskripsi Provinsi Sumatera Utara
- B. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- C. Gambaran Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Utara

### BAB IV : PENDUDUK DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SUMATERA UTARA

- A. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Utara Pada Pemilu**
- B. Porelahan Kursi DPRD Sumatera Utara 2004-2009
- C. Porelahan Kursi DPRD Sumatera Utara 2009-2014

### BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

## BAB II

### PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA

#### A. PADA MASA ORDE BARU

Sejarah mencatat, sebelum Orde Baru lahir didahului dengan meletusnya tragedi nasional yang sering disebut dengan Pemberontakan G 30S / PKI, tepatnya tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini puncaknya adalah dini hari, tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa itu menyebabkan enam Jenderal terkemuka dibunuh secara kejam dan sadis oleh komplotan militer yang mempunyai hubungan dengan PKI. Banyak versi yang berusaha mengungkap siapa pelaku peristiwa tersebut, namun umumnya yang diakui oleh banyak kalangan PKI-lah pelakunya. Seusai peristiwa berdarah yang merenggut enam nyawa Jenderal TNI AD itu, 30 September 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang kemudian justru menjadi titik awal kelahiran Orde Baru (Pusponegoro dan Notosusanto, 1993 : 406). Isi dari Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tersebut ialah memberikan kekuasaan kepada Letjen. Soeharto, untuk dan atas nama Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi, mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kesetabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi / Mandataris MPRS, serta demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Isi lengkap dari Surat Perintah tersebut ada di lampiran 1 (Tim Dokumentasi Presiden RI, 1991: 54).

Pada saat terjadi peristiwa pemberontakan G 30 S / PKI Provinsi Sumatera Utara juga bersiap melawan geraka pemberontakan. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, segenap masyarakat segera melakukan konsolidasi guna pengejaran / pembersihan terhadap oknum-oknum masyarakat yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan gerakan G 30 S / PKI. Dalam hal ini ABRI bersama rakyat bekerja sama erat dan serentak dengan unsur-unsur masyarakat lain dengan semangat berkobar-kobar berusaha *mengganyang* sisa-sisa G 30 S / PKI.



Tonggak awal kelahiran Orde Baru adalah ketika diserahkannya Supersemar 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi kunci yang sangat menentukan. Supersemar yang pada awalnya hanya berupa surat perintah biasa dari Presiden Soekarno kemudian dalam Sidang Umum ke IV MPRS ditetapkan sebagai Ketetapan MPRS No. IX / 1966. Sidang Paripurna terbuka MPRS menyetujui dan memperkuat Surat Perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 oleh Presiden / Panglima Tertinggi / Mandataris MPRS dan ditujukan kepada Letjen. Soeharto selaku Menpangad. Dalam sidang tersebut anggota-anggota MPRS secara bulat menyetujui ditingkatkannya Supersemar menjadi Ketetapan MPRS No. IX / 1966. Dengan ketetapan ini berarti bahwa Supersemar tidak dapat ditarik kembali oleh Presiden / Panglima Tertinggi ABRI / Mandataris MPRS, sebab hanya MPRS-lah yang berhak untuk membatalkannya. Isi lengkap Ketetapan tersebut ada di lampiran 2 (Tim Dokumentasi Presiden RI, 1991: 86). Ketetapan ini selanjutnya dijadikan landasan politik bagi beroperasinya pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Bersama dengan itu Supersemar ditetapkan sebagai salah satu sumber hukum Republik Indonesia dan tertuang dalam Tap MPR No. XX / MPRS

1966 mengenai memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Dengan demikian Supersemar dianggap sebagai landasan hukum dan politik bagi keberadaan rezim Orde Baru di Indonesia. Pada tahun 1967 MPRS melakukan Sidang Istimewa, dalam sidang tersebut Komisi A MPRS telah berhasil membuat Rancangan Ketetapan mengenai Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Alasan yang mendasari Rancangan Ketetapan ini adalah bahwa Presiden tidak dapat memenuhi tanggungjawab konstitusional, dan bahwa Presiden tidak dapat menjalankan haluan negara dan keputusan MPRS. MPRS menerima dan mensahkan Rancangan Ketetapan MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden RI.

Pelantikan ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XXXIII / 1967 yang menetapkan mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandate MPRS dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini selanjutnya menetapkan mengangkat Pemegang Ketetapan MPRS No. IX /1966, Jenderal Soeharto, sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Awal kelahiran Orde Baru ini juga dihadapkan pada persoalan lumpuhnya ekonomi negara yang ditunjukkan dengan laju inflasi yang sangat tinggi. Menurut Frans (1998), pada waktu masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru juga terjadi krisis ekonomi (1966-1968). Krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh etatisme yaitu negara terlalu berkuasa dalam komando ekonomi,

juga terjadi defisit yang terakumulasi sejak 1960 hingga 1966 yang menyebabkan timbulnya inflasi sebesar 650 persen serta pada waktu itu negara tidak menganggap dunia luar atau istilahnya “*go to hell*”-kan dunia luar. Adapun kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis tersebut adalah dengan menentukan kebijakan yang akan diambil yakni enam bulan untuk *rescue operation* (operasi penyelamatan), serta dua tahun untuk stabilitas, sehingga baru pada 1 April 1969 kita bisa melakukan pembangunan. Rincian operasi penyelamatan krisis ekonomi tersebut adalah dengan menentukan target. Target pertama adalah mengenai pangan dan yang kedua adalah mengenai pembayaran hutang dikarenakan apabila tidak bias membayar negara kita dianggap bangkrut. Program penyelamatan tersebut lalu disusun bersama dengan IMF, pada 31 Agustus 1966 program tersebut dibawa ke sidang cabinet untuk dimintakan persetujuan. Setelah delegasi Indonesia berangkat keseluruh dunia membawa program tersebut. Delegasi tersebut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Frans Seda, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan dua anggota DPR, negara yang menjadi tujuan adalah Inggris, Belanda, Jerman kemudian Tokyo. Kemudian berdasar program tersebut maka pada 3 Oktober 1966 keluarlah peraturan pemerintah pertama yang telah disetujui oleh DPR yang kemudian dikenal dengan “peraturan 3 Oktober”. Setelah dikeluarkan peraturan tersebut kepercayaan dunia menjadi semakin bertambah dan pada 7 Februari 1967, terbentuklah IGGI, kelompok negara donor kita (Frans Seda, FORUM, 1998: 82-83). Pada sisi lain, awal kelahiran Orde Baru ini dihadapkan pada dua persoalan besar sebagai warisan sejarah Orde Lama, yaitu politik dan lumpuhnya ekonomi yang ditunjukkan dengan laju inflasi yang sangat tinggi. Kondisi perpolitikan menjelang dan pada permulaan berdirinya

Orde Baru memang terlihat sangat kacau dan sulit dikendalikan. Hal ini akibat logis dari langgam politik Orde Lama yang otoritarian dalam bingkai Demokrasi Terpimpin menuju bentuk kearah “Demokrasi Pancasila” dibawah pemerintahan Orde Baru.

## **B. SEJARAH PEMILU INDONESIA**

Sudah delapan kali kita, bangsa Indonesia, menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara. Pemilu yang akan kita lakukan 2004 mendatang adalah yang ke-9. Sementara Pemilu 2004 masih dalam tahap persiapan, ada baik-nya mengetahui bagaimana Pemilu-pemilu yang lalu dilaksanakan dan seperti apa hasilnya. Selain itu apakah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam peraturan atau undang-undang yang mengatur Pemilu yang satu ke Pemilu berikutnya. Sebagai contoh bisa disebut di sini bahwa dalam enam kali Pemilu, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 tidak ada perubahan apa-apa dalam sistem pembagian kursi DPR. Tentu perubahan di bidang lainnya ada juga. data mengenai perolehan suara tiap Pemilu juga tetap merupakan informasi yang baik untuk diketahui.

### **PEMILU 1955**

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh

Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan ?penyimpangan? tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkiisan (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan oleh dua hal yakni :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) . Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan

Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkampanye secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya perlu di paparkan semuanya.

Hasill Pemilu 1955 untuk Anggota DPR

NO	Nama Partai	Suara Sah	%	Kursi
1.	. Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,66	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,40	1
19.	. Grinda	154.792	0,47	1

20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,41	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,40	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,39	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,30	1
24.	AKUI	81.454	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100,00	257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

### Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

NO	Nama Partai	Suara Sah	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	456.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2

20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Kebrabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng RI	39.874	0,11	1
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M. Idrus Efendi	31.988	0,08	1
35.	Lain-Lain	426.856	1,13	-
	Jumlah	37.837.105	100,00	514

### Periode Demokrasi Terpimpin

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat

Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang ? meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree. Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden. Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963

MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

### **Pemilu 1971**

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat

negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus accord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accord dari perolehan kursi

pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar. Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat daftar di bawah ini.

NO	Nama Partai	Suara Sah	%	Kursi
1.	GOLKAR	34.384.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	-
10.	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100,00	360

## **Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997**

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

## Hasil Pemilu 1977

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar. PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5. PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada daftar tabel di bawah ini.

NO	Nama	Suara	%	Kursi	%	1971	Ket
1	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	+	0,69
2	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	-	2,17
3	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	+	1,48
	Jumlah	63.998.344	100,00	360	100,00		

### Hasil Pemilu 1982

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

NO	Nama	Suara	%	Kursi	%	1977	Ket
1	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	-	2,23
2	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	+	1,51
3	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	-	0,72
	Jumlah	75.126.306	100,00	364	100,00		



## Hasil Pemilu 1987

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.

NO	Nama	Suara	%	Kursi	%	1982	Ket
1	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	-	8,82
2	PPP	13.701.428	15,97	61	7,78	-	11,81
3	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+	2,99
	Jumlah	85.869.816	100,00	400	100,00		

## Hasil Pemilu 1992

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya. PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka?bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional. Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.

NO	Nama	Suara	%	Kursi	%	1987	Ket
1	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	-	5,06
2	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+	1,04
3	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+	4.02
	Jumlah	97.789.534	100,00	400	100,00		

### Hasil Pemilu 1997

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya. PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar. Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

NO	Nama	Suara	%	Kursi	%	1992	Ket
1	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+	6,41
2	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+	5,43
3	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	-	11,84
	Jumlah	112.991.150	100,00	425	100,00		

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.

### **Pemilu 1999**

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Ini berarti bahwa

dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13

bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

### **Hasil Pemilu 1999**

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara. Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-

keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa. Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord. Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan

11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

NO	NAMA PARTAI	SUARA DPR	KURSI(SA)	KURSI (DSA)
1.	PDIP	32.689.073	153	154
2.	GOLKAR	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	PARTAI KEADILAN	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3
11.	PBI	364.291	1	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1
15.	PSII	375.920	1	1

16.	PNI FRONT MARHAENIS	365.176	1	1
17.	PNI MASSA MARHAEN	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	MASYUMI	456.718	1	-
21.	PKD	216.675	1	-
22.	PNI SUPENI	377.137	-	-
23.	KRISNA	369.719	-	-
24.	PARTAI KAMI	289.489	-	-
25.	PUI	269.309	-	-
26.	PAY	213.979	-	-
27.	PARTAI REPUBLIK	328.564	-	-
28.	PARTAI MKGR	204.204	-	-
29.	PIB	192.712	-	-
30.	PARTAI SUNI	180.167	-	-
31.	PCD	168.087	-	-
32.	PSII 1905	152.820	-	-
33.	MASYUMI BARU	152.589	-	-
34.	PNBI	149.136	-	-

35.	PUDI	140.980	-	-
36.	PBN	140.980	-	-
37.	PKM	104.385	-	-
38.	PND	96.984	-	-
39.	PADI	85.838	-	-
40.	PRD	78.730	-	-
41.	PPI	63.934	-	-
42.	PID	62.901	-	-
43.	MURBA	62.006	-	-
44.	SPSI	61.105	-	-
45.	PUMI	49.839	-	-
46.	PSP	49.807	-	-
47.	PARI	54.790	-	-
48.	PILAR	40.517	-	-
	JUMLAH	105.786.661	462	462

Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder. Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971. Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang.

### C. PEMILU DI SUMATERA UTARA

Jika kita melihat perkembangan Pemilu yang dilaksanakan secara nasional dari mulai yang pertama kali dimana sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa dengan berhasilnya orde baru melakukan fusi dimana kekuatan yang selalu menang adalah Golkar dan sampai pemilu tahun 1997 posisi kedua dan ketiga selalu diduduki oleh PPP atau PDI, sedangkan Pemilu pertama reformasi kemenangan dikuasai oleh PDIP dan Golkar pada posisi kedua dan keadaan ini bisa dibilang hampir sama dengan keadaan secara nasional, sedangkan untuk pemilu selanjutnya akan kita bahas secara khusus pada bab IV.

## BAB III

### A. DESKRIPSI PROVINSI SUMATERA UTARA

Propinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Propinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan. Luas daratan Propinsi Sumatera Utara 71.680 km<sup>2</sup>, Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan.

Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri,

pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi kedalam empat wilayah Pembangunan.

Sumatera Utara merupakan propinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km<sup>2</sup> dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000. TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

## **B. VISI DAN MISI PEMERINTAH SUMATERA UTARA**

1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, konsisten dan konsekuen, menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam bingkai keluarga besar masyarakat Sumatera Utara yang harmonis.
2. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta menggunakan akal sehat,

dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan cirri identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk karena pandai menghargai adat.

3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.
4. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak, tanpa adanya tingkat kesenjangan yang signifikan.
5. Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan didalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama secara proporsional dalam lingkup masyarakat yang merasa dipinggirkan, dilupakan dan ditinggalkan.
6. Tata pemerintahan yang baik atau good governance menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum.

## MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dibuatlah Misi seperti berikut ini :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka menghilangkannya sama sekali dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa aman masyarakat.
4. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan kesenjangan wilayah melalui kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dan kerjasama Regional dan Internasional.
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah, termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada sector pertanian, agroindustri, pariwisata serta sector unggulan lainnya, dengan cara investasi dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
6. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja

yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan.

7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya dapat terlihat dari antara lain, komposisi pejabat di pemerintahan daerah yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Sumatera Utara yang serasi.

#### A. INDIKATOR KEPENDUDUKAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah penduduk	Ribu Jiwa	11.890*	12.151	12.288
2.	Pertumbuhan penduduk	Persen	1,14	1,10	
3.	Tingkat kelahiran (TFR)	Rata - rata kelahiran PUS	3,03	2,96	2,91
4.	Tingkat kematian bayi (IMR)	Perseribu kelahiran hidup	37,00	36,00	35,50
5.	Harapan hidup (e <sup>0</sup> )	Tahun	68,00	68,20	68,50
6.	Penduduk miskin	Persen	15,89	15,50	15,00
7.	Tingkat kesakitan penduduk	Persen	16,62	16,00	15,50

Keterangan : \*) Hasil Sementara Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B)

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

#### B. INDIKATOR KEPENDIDIKAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partisipasi Sekolah				
	❖ 7= 12 tahun	Persen	98,25	98,50	99,00
	❖ 13- 15 tahun	Persen	88,51	89,00	89,30
	❖ 7-15 tahun	Persen	95,07	95,50	96,00
2.	Pendidikan yang ditamatkan				
	❖ Tidak / belum tamat SD	Persen	22,76	22,00	21,50

## B. GAMBARAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SUMATERA UTARA

Melihat dari deskripsi diatas maka jelas menurut administrasi pembangunan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pembangunan politik suatu Negara termasuk dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara karena pemerintah Sumatera Utara tidak dapat bertindak sendiri dalam hal politik kecuali mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Negara kesatuan Republik Indonesia.

Tahap-tahap pertumbuhan politik dalam rangka pembangunan nasional adalah (Siagian Sondang : 1988) :

1. Menciptakan stabilitas politik
2. Penyusunan kembali struktur-struktur organisasi politik (*restructuring of political organizations*)
3. *Political take off* , yakni dimulainya usaha-usaha oleh partai-partai politik yang telah disederhanakan dan dimatangkan untuk turut serta secara aktif dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang.

Memahami dari konsep diatas maka timbul pertanyaan apakah pola perkembangan partai politik di Sumatera Utara telah memasuki keadaan *Political Take off* atau belum tulisan ini akan mencoba memperdalamnya pada pembahasan berikut.

Hal lain yang menjadi faktor yang sangat khas di Sumatera Utara adalah keberagaman suku dan ras yang ada selain bias sebagai potensi tetapi disi lain jika tidak dapat diatur dan diarahkan secara bijaksana bias menjadi sumber konflik yang merusak tatanan demokrasi.

## BAB IV

### PENDUDUK DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SUMATERA UTARA

#### A. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Utara Pada Pemilu

Dari data dibawah ini jelas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilu sudah sangat baik namun demikian masih banyak terdapat yang golput sesuai dengan publikasi oleh media cetak bahwa begitu banyaknya masyarakat yang tidak dapat memilih karena mereka tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap, begitu banyaknya persoalan yang masih menyisakan pelaksanaan pemilu membuat kita bertanya mengapa mereka tidak ikut memilih, apa mereka adapat disebut sebagai Golongan Putih atau mereka karena keterbatasan waktu tidak dapat mencapai tempat pemungutan Suara, sampai saat ini belum dapat dijawab secara ilmiah karena mereka yang tidak memilih akan sangat sulit didapat dan akan berkata jujur.

Disisi lain sebenarnya kita dapat melihat bahwa sebahagian dari mereka ada yang tidak percaya bahwa Pemilu ada kaitannya terhadap perubahan nasib mereka sebagaimana diungkapkan bahwa Mibrath Goel(dalam Faturohman dan Subari, 2004 : 191) ada tujuh bentuk partisipasi politik individual dalam sebuah negara :

1. *aphatetic inactives* : tidak beraktifitas dan patisipatif (tidak pernah memilih)
2. *passive supporters* : memilih secara regular/teratur, menghadiri patriotic dan membayar seluruh pajak.

3. *contact specialist* : Pejabat penghubung local(daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-malah tertentu
4. *Comunicators* : mengikuti informasi politik, terlihat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan dukungan dan protes terhadap pimpinan politik.
5. *party dan campaign workes* : bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat tertentu, bergabung dan mendukung partai politik tertentu.
6. *community activist* : bekerja dengan orang-orang lain yang berkaitan dengan masalah-masalah local, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem local, keanggotaan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat berkenaan dengan isu-isu lokal.
7. *protesters* : bergabung dengan demonstrasi-demontrasi public dijalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadiri pertemuan protes, menolak ematuhi aturan-aturan.

Dari uraian tentang partisipasi politik diatas jelas bagi kita bahwa sangat bergamnya jenis partisipasi dari yang tidak berpartisipasi, kemudian yang hanya sekedar ikut-ikutan, aktif untuk tujuan pembangunan dengan cara yang elegan dan sampai pada cara yang ekstrim, di Sumatera Utara hampir bisa dipastikan bahwa dari sekian banyak yang berpartisipasi semua jenis diatas ada, namun kembali karena keterbatasan karya ilmiah ini kita tidak mengkajinya lebih dalam berikut ditampilkan

data jumlah penduduk Sumatera Utara yang termasuk pemilih pada Pemilu 2004 sebanyak 11.890.399 orang dan pada pemilu 2009 mengalami penambahan jumlah.

#### DATA JUMLAH PENDUDUK,TAHUN 2004

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK
1	MEDAN	1.979.340
2	DELI SERDANG	1.505.281
3	SERDANG BEDAGAI	549.426
4	TEBING TINGGI	132.760
5	ASAHAN	990.230
6	TANJUNG BALAI	144.979
7	LABUHAN BATU	910.502
8	MANDAILING NATAL	369.691
9	TAPANULI SELATAN	615.757
10	P. SIDEMPUAN	148.967
11	NIAS	422.170
12	NIAS SELATAN	275.422
13	TAPANULI TENGAH	272.333
14	SIBOLGA	85.505
15	TAPANULI UTARA	255.162
16	HUMBANG HASUNDUTAN	152.377
17	TOBA SAMOSIR	166.444
18	SAMOSIR	119.142
19	SIMALUNGUN	808.288
20	P. SIANTAR	223.949
21	DAIRI	255.847
22	PAKPAK BHARAT	33.822
23	KARO	306.869
24	LANGKAT	940.601
25	BINJAI	225.535
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.890.399</b>

Sumber: Situs KPU SUMUT

Dibawah ini kita dapat melihat perbandingan bagaimana partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dari jumlah pemilih dan bagaimana pula penurunan jumlah pemilih pilpres putaran I dan putaran II serta pemilihan legislatif.

#### DATA JUMLAH PEMILIH TAHUN 2004

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH		
		LEGISLATIF	PILPRES I	PILPRES II
1	MEDAN	1.388.714	1.501.834	1.487.436
2	DELI SERDANG	983.591	1.025.670	1.022.266
3	SERDANG BEDAGAI	355.151	368.679	366.638
4	TEBING TINGGI	90.291	94.531	94.331
5	ASAHAN	625.795	676.645	660.329
6	TANJUNG BALAI	89.259	92.604	92.596
7	LABUHAN BATU	559.037	587.767	577.572
8	MANDAILING NATAL	216.490	230.187	227.263
9	TAPANULI SELATAN	362.564	396.892	387.486
10	P. SIDEMPUAN	105.950	114.799	110.660
11	NIAS	244.625	261.732	247.153
12	NIAS SELATAN	152.196	160.043	157.339
13	TAPANULI TENGAH	158.513	168.586	168.158
14	SIBOLGA	55.501	57.998	55.488
15	TAPANULI UTARA	152.839	160.481	156.011
16	HUMBANG HASUNDUTAN	90.096	92.252	92.129
17	TOBA SAMOSIR	102.841	105.926	102.301
18	SAMOSIR	71.545	73.691	72.653
19	SIMALUNGUN	531.135	545.865	548.797
20	P. SIANTAR	147.983	154.147	151.872
21	DAIRI	147.931	155.456	151.229
22	PAKPAK BHARAT	21.214	20.783	19.850
23	KARO	207.174	217.584	214.166
24	LANGKAT	616.919	642.346	641.150
25	BINJAI	152.277	158.211	156.061
<b>JUMLAH</b>		<b>7.629.631</b>	<b>8.064.709</b>	<b>7.960.934</b>

B. Porelahan Kursi DPRD Sumatera Utara 2004-2009

PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH
Partai Golongan Karya	1. Abdul Wahab Dalimunthe, SH
Partai Golongan Karya	2. Drs. Nurdin Ahmad
Partai Golongan Karya	3. Ir. H. Sujarwono
Partai Golongan Karya	4. H. M. Darwin Harahap, SE
Partai Golongan Karya	5. H. Amas Muda Siregar, SH
Partai Golongan Karya	6. H. Soedjono Hoemardhani, SE
Partai Golongan Karya	7. Drs. H. Hasnan Said
Partai Golongan Karya	8. H. Dahlan Hasibuan, SH
Partai Golongan Karya	9. H. M. Zaki Abdullah
Partai Golongan Karya	10. Drs. H. Mahmuddin Lubis
Partai Golongan Karya	11. Hj. Apriani Hakim Nasution, SE
Partai Golongan Karya	12. Zaman Gomo Mendrofa
Partai Golongan Karya	13. Ir. GM. Chandra Panggabean
Partai Golongan Karya	14. H. Syukran J. Tandjung, SE
Partai Golongan Karya	15. H. Syahrul M. Pasaribu
Partai Golongan Karya	16. Drs. Pangihutan Siagian
Partai Golongan Karya	17. Drs. A. Azis Angkat
Partai Golongan Karya	18. Dra. Hj. Darmataksiah YWR
Partai Golongan Karya	19. H. Marzuki

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1. Jhon Eron Lumbangaol, SE
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2. Ir. Yantoni Purba, MM
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3. Zakaria Bangun, SH
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4. Naik Tarigan BBA
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5. Ir. Ramses Simbolon, M.Sc.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6. Syamsul Hilal
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7. Efendy Naibaho
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8. Isrok Anshari Siregar
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9. Analisman Zalukhu, S.Sos.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10. Budiman Pardamean Nadapdap, SE
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11. Japorman Saragih
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12. Ir. Taufan Agung Ginting
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13. Eddi Rangkuti
Partai Demokrat	1. Hj. Wardaty Nasution, BA
Partai Demokrat	2. H. Mutawalli Ginting
Partai Demokrat	3. Drs. Hasbullah Hadi, SH, Spn
Partai Demokrat	4. Almal Samosir, S.Ag.
Partai Demokrat	5. Ahmad Ikhyar Hasibuan
Partai Demokrat	6. Drs. H. Rahmad P. Hasibuan
Partai Demokrat	7. Aliozisokhi Fau, S.Pd.
Partai Demokrat	8. Belly Simanjuntak
Partai Demokrat	9. Azwir A. Husin

Partai Demokrat	10. Ristiawati
Partai Keadilan Sejahtera	1. Sigit Pramono Asri, SE
Partai Keadilan Sejahtera	2. H. Arifin Nainggolan, SH, M.Si.
Partai Keadilan Sejahtera	3. Ir. Fanin Nurlita Nainggolan, M.Si
Partai Keadilan Sejahtera	4. Muhammad Nuh
Partai Keadilan Sejahtera	5. Hidaytullah, SE
Partai Keadilan Sejahtera	6. Zulkarnain, ST
Partai Keadilan Sejahtera	7. Heriansyah
Partai Keadilan Sejahtera	8. Timbas, Amd
Partai Amanat Nasional	1. Drs. H. Ibrahim Sakty Batubara, MAP
Partai Amanat Nasional	2. H. Azwir Sofyan
Partai Amanat Nasional	3. Ir. Kamaluddin Harahap, M.Si
Partai Amanat Nasional	4. Isfan F. Fachruddin, SE
Partai Amanat Nasional	5. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum
Partai Amanat Nasional	6. Drs. H. Porkas Lelo Harahap
Partai Amanat Nasional	7. Rafriandi Nasution, SE
Partai Amanat Nasional	8. Drs. Parluhutan Siregar
Partai Persatuan Pembangunan	1. Drs. H. Yulizar Parlagutan Lubis
Partai Persatuan Pembangunan	2. Drs. Abul Hasan Harahap
Partai Persatuan Pembangunan	3. Fadly Nurzal, S.Ag.
Partai Persatuan Pembangunan	4. H. Ali Jabbar Napitupulu
Partai Persatuan Pembangunan	5. Drs. Rijal Sirait

Partai Persatuan Pembangunan	6. Ahmad Hosen Hutagalung, SAg.
Partai Persatuan Pembangunan	7. Drs. H. Zulkarnain Malik
Partai Persatuan Pembangunan	8. H. Nailul Amali
Partai Damai Sejahtera	1. DR (HC) Drs. Toga Sianturi
Partai Damai Sejahtera	2. Pdt. Petrus Sihombing, S.Th
Partai Damai Sejahtera	3. Drs. Amaano Fau, M.Si.
Partai Damai Sejahtera	4. Drs. Burhanuddin Rajagukguk
Partai Damai Sejahtera	5. Ir. Sahat Haodjahan Situmorang
Partai Damai Sejahtera	6. Ir. Tonnies Sianturi
Partai Bintang Reformasi	1. H. Raden Muhammad Syafi'i, SH
Partai Bintang Reformasi	2. Ir. Tosim Gurning
Partai Bintang Reformasi	3. Drs. Mursito Kabu Kasuda
Partai Bintang Reformasi	4. Wira Abdi, S.Si
Partai Bintang Reformasi	5. Drs. Asyirwan Yunus
Partai Bulan Bintang	1. H. Banuaran Ritonga
Partai Bulan Bintang	2. Fahrijal Dalimunthe, S.Ag.
Partai Bulan Bintang	3. Ir. Bustinursyah, M.Sc., IAI
Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1. Elbiner Silitonga
Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	1. Samsudin Siregar, SH

Partai Patriot Pancasila	1. Ir. Edison Sianturi
Partai Pelopor	1. Daniel Duha, SH
Partai Buruh Sosial Demokrat	1. Ir. Harman Manurung

Jika kita melihat bahwa kemenangan Golkar memperoleh kursi terbanyak di DPRD Sumatera utara pada Pemilu 2004 ini mengulang sukses (19 kursi dari 85 kursi yang ada pada masa Orde baru dimana Golkar menjadi pemenang pada setiap Pemilu dan PDIP yang pada Pemilu 1999 menjadi pemenang pada Pemilu ini harus rela berada pada posisi kedua yakni memperoleh 13 kursi, dan hal yang sangat mengejutkan terjadi pada partai kompetitor pada masa orde baru yakni PP sejak Pemilu 1999, 2004 dan 2009 terus mengalami penurunan pada pemilu kali ini hanya mendapat 8 kursi, partai baru yakni PKS dan partai democrat memperlihatkan perkembangan yang signifikan.

NO	Nama Partai Pemilu 2004
1.	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME
2.	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT
3.	PARTAI BULAN BINTANG
4.	PARTAI MERDEKA
5.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6.	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN

7.	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU
8.	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN
9.	PARTAI DEMOKRAT
10.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
11.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
12.	PARTAI NAHDLATUL UMMAH INDONESIA
13.	PARTAI AMANAT NASIONAL
14.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
15.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
16.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
17.	PARTAI BINTANG REFORMASI
18.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
19.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA
20.	PARTAI GOLONGAN KARYA
21.	PARTAI PATRIOT PANCASILA
22.	PARTAI SYARIKAT INDONESIA
23.	PARTAI PERSATUAN DAERAH
24.	PARTAI PELOPOR

### C. Porelahan Kursi DPRD Sumatera Utara 2009-2014

Partai Demokrat Palar Nainggolan SH, H Arifin Nainggolan SH, Hj Meilizar Latif, M Yusuf Siregar, Nurhasanah, Tunggul Sinaga, Enda Mora Lubis, Robert

Nainggolan, Hasbullah Hadi, Tahan Manahan Panggabean, Guntur Manurung, Marahalim Harahap, Salomo Tabah Ronal Pardede, Mustofawiyah, Khairul Fuat, Amarullah Nasution, Ida Budiningsih, Jamaluddin Hasibuan, Tiaisah Ritonga, Sopar Siburian, John Hugo Silalahi, Megalia Agustina, Layari Sinukaban, Saleh Bangun, Dirkhansyah Abu Subhan Ali, Ristiwati dan Ramli. Dari P Golkar Syafrida Fitri, Evi Diana, Hemiati, Isma Padly, Chaidir Ritonga, Mulkan Ritonga, Biller Pasaribu, Ajib Shah, Syahrul M Pasaribu, Richard Eddy M Lingga, Jefri Januar Pribadi, Sudirman Halawa. F-PKS Sigit Pramono Asri, Taufik Hidayat, Siti Aminah, Muhammad Nasir, Muhammad Nuh, Zulkarnain, Nur Azizah Tambunan, Amsal Nasution, Andri Arba dan Timbas Tarigan. Dari PDI Perjuangan Tagor Pandapotan Simangunsong, Brilian Moktar, Effendi S Napitupulu, Alamsyah Hamdani, Syamsul Hilal, Muhammad Afan, Edi Rangkuti, Budiman P Nadapdap, Japorman Saragih, Taufan A Ginting, Fahru Rozi dan Analisman Zalukhu SSos MSP. F-PAN Kamaluddin Harahap, Zulkifli Husein, Muslim Simbolon, Parluhutan Siregar, Maratua Siregar, Irwansyah Damanik, Syahrial Harahap. Dari PPP terdiri dari Rijal Sirait, Ali Jabbar Napitupulu, Fadly Nurzal, Bustami, Abul Hasan Maturidi, AH Hutagalung dan Nurul Azhar Lubis. Dari F-PDS Tonies Sianturi, Arlene Marpaung, Marasal Hutasoit, Tohanan Silalahi dan Darmawan Sembiring. Dari Partai Hanura terdiri dari Musdalifah, Zulkifli Effendi Siregar, Hamamisul Bahsan, Aduhot Simamora dan Suasana Dachi. Anggota dewan dari PPRN yang dilantik Washington Pane, Rahmianna Delima Pulungan, Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi. Dari Partai Gerindra terdiri dari Iman B Nasution, Mulyani dan Yan Syahrin. Sedangkan dari PPIB Sonny

Firdaus, dari PBR Kharuddin Syah, dari PPD Oloan Simbolon, dari PKB Pasaribu Daulay dan dari PBB Ferry Suando Tanuray Kaban, serta Kurniawan Sarumaha dari Partai Pelopor.

Pada Pemilu 2009 ini memenang berpindah kepada partai Demokrat hal ini menurut analisa yang menjadi opini saat ini dikarena popularitas SBY sebagai tokoh sentral partai democrat, sementara partai-partai lain yang sebelumnya menjadi pemenang harus rela turun pada posisi berikut seperti partai Golkar.

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Utara tutup mulut dan enggan membicarakan berkurangnya raihan kursi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Partai Golkar yang menjadi pemenang Pemilu 2004 dan meraih 19 kursi di DPRD Sumut, pada Pemilu Legislatif 2009, dari hasil rekapitulasi sementara di sembilan daerah pemilihan, baru meraih 10 kursi. Dengan hanya tersisa dua dapil lagi yang belum merekapitulasi, kemungkinan besar Golkar hanya meraih paling banyak 13 kursi. Dan kenyataannya sampai ditetapkan Golkar memperoleh 12 kursi, Padahal jatah kursi DPRD Sumut pada periode 2009-2014 justru melonjak menjadi 100 kursi dari 85 kursi pada periode 2004-2009.

Partai-partai yang tumbuh secara perlahan seperti PKS harus terus mampu menjaga citra dan gerakan perjuangannya agar tidak anjlok pada Pemilu berikutnya sedangkan partai yang kemenangannya kareana faktor publik pigur harus segera merubah kondisi ini dengan program yang lebih nyata bagi rakyat.

Fenomena jumlah partai yang terlalu banyak dimana pada Pemilu 2004 jumlahnya sebanyak 24 partai dan pada Pemilu 2009 mencapai 40 puluhan partai termasuk adanya partai politik lokal di Aceh, memperlihatkan bahwa pemerintah belum mampu melakukan strukturisasi partai politik yang ada di Indonesia karena jumlahnya semakin banyak, kita berharap pada Pemilu kedepan jumlah ini dapat diperkecil dengan adanya pembatasan jumlah partai dengan syarat kelulusan partai secara nasional pada Pemilu 2009 dan juga pemerintah dapat melakukan seleksi yang ketat terhadap partai baru untuk Pemilu 2014.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penulisan ini dapat dikemukakan berbagai kesimpulan sebagai berikut : Kondisi Kehidupan Partai politik di provinsi Sumatera Utara Pada Masa Orde Baru Tahun 1971-1997 Perjalanan partai politik di provinsi Sumatera Utara senantiasa diwarnai oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat seperti dalam jumlah partai politik peserta pemilu serta kapan pemilu itu akan dilaksanakan. Dalam Pemilihan umum pertama yang dilaksanakan pada tahun 1971 yang diikuti 10 partai politik untuk wilayah pemilihan provinsi Sumatera Utara suara terbanyak diraih oleh Golkar dan pemilu pertama ini pula yang kemudian mengantarkan Golkar untuk meraih kemenangan-kemenangan disetiap periode pemilu pada masa orde baru. Pada pemilu 1977 terjadi penyederhanaan/ fusi partai dari yang awalnya 10 partai kemudian menjadi 3 partai termasuk Golkar, dan kembali Golkar meraih kemenangan besar. Berdasarkan hasil perolehan suara dimana Golkar selalu mendapatkan suara terbanyak maka menjadikan Golkar mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan khususnya untuk pembangunan wilayah provinsi Sumatera Utara. Setelah keruntuhan orde baru kemudian lahir orde reformasi yang diawali dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, menyebabkan dunia perpolitikan di wilayah provinsi Sumatera Utara juga ikut berubah, hal itu ditunjukkan dengan dilaksanakannya pemilihan umum 1999 yang merupakan pemilu pertama dari pemerintahan orde reformasi.

Keadaan keterpurukan partai-partai yang telah malang melintang pada masa orde baru harus segera disadari oleh partai politik seperti Golakar, PDIP dan PPP, sehingga partai ini kembali dicintai oleh rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Bagi warga masyarakat provinsi Sumatera Utara, Hendaknya masyarakat provinsi Sumatera Utara lebih teliti dan selektif dalam memilih partai dan wakilnya di Dewan. Jangan hanya mengikuti anjuran dan saran dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan tambahan suara untuk kepentingan pribadi. Jangan hanya terkecoh dan termakan janji-Janji segelintir orang yang menginginkan kekuasaan. Hendaknya pula sebagai warga Negara yang baik masyarakat provinsi Sumatera Utara menggunakan hak pilihnya, karena ini merupakan salah satu cara untuk menyuarkan aspirasi masyarakat.
2. Bagi Partai Politik.
  - a. Hendaknya partai politik di provinsi Sumatera Utara memiliki program kerja sendiri jangan hanya mengikuti keputusan dari pusat untuk dilaksanakan di daerah supaya daerah tersebut menjadi lebih maju. Selain itu sebaiknya program-program kerja parti lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak bukan hanya untuk kepentingan partai sendiri.
  - b. Dengan aspirasi dari masyarakat, jadikan partai politik sebagai tempat yang tepat untuk mengadakan segala permasalahan kehidupan politik rakyat.

### 3. Kepada DPRD provinsi Sumatera Utara

Hendaknya para wakil rakyat bisa melihat lebih dalam tentang segala permasalahan yang dihadapi rakyat, dan seharusnya mereka juga tahu bahwa mereka duduk di Dewan karena suara dari rakyat. Jadi DPRD Sumatera Utara harus bertindak untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan partai politiknya.

### 4. Kepada Pemerintah Pusat

Secara konsep bahwa jumlah partai yang besar merupakan masalah besar dari pelaksanaan Pemilu baik dari segi dana dan pelaksanaannya secara teknis, maka kedepan jumlah partai ini harus bisa di batasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Ibrahim Harmaily, Siahaan Iskandar. 1984. *Politik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta : IND – HILL, CO
- Gottschalk,louis.1975.*Mengerti Sejarah,Pengantar Metode Sejarah*. Terjemahan: Nugroho Notosusanto.Jakarta:UI Press.
- Huntington, Samuel P. 2003, *Tertib Politik ditengah Pergeseran Kepentingan Raja, Garfindo Persada*, Jakarta
- Team Dokumentasi Presiden RI. 1991. *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Safroedin.1997. *50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Siagian,Sondang, 1988, *Administrasi Pembangunan, Haji Masagung*, Jakarta
- Surbakti, Ramlan, 2003, *Memahami Politik*. Grasindo, Jakarta.
- WWW. KPU SUMUT.Go.Id
- WWW. KOMPAS.Co.Id
- WWW.HARIAN SIB.Co.id